



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2017-2021 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024 sampai dengan 2026;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188;
8. Peraturan Daerah Kabupten Kutai Kartanegara Nomor 12 tahun 2016 tentang ketahanan pangan dan gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB II RAD-PG

Pasal 2

- (1) RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta sub kegiatan.
- (2) RAD-PG menjadi pedoman PD untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : ANALISIS SITUASI;
 - c. BAB III : RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI;
 - d. BAB IV : PELAKSANAAN RENCANA AKSI;
 - e. BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; DAN
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 75 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2017-2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 40

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN

DAN GIZI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2022) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sebuah kabupaten memiliki jumlah penduduk 778.096 jiwa dengan luas wilayah yang cukup luas, yaitu 27.230 km².

Kejadian rawan dan krisis pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik, sehingga hal ini menjadi sangat penting bagi Kutai Kartanegara untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di wilayah rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kab. Kutai Kartanegara secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif apabila memiliki arah yang jelas dan kinerja yang terukur. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measureable*) dan berkesinambungan (*sustainability*) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024 dan Gubernur Kalimantan Timur telah menetapkan peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sehingga perlu ditindak lanjuti oleh daerah.

Oleh karena itu untuk menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu di bidang pangan dan gizi dalam rangka mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2024-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara. RAD-PG Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki periode 2024-2026 guna menyesuaikan dengan dokumen RPJMD kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Penyusunan RAD-PG Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2026 ini merupakan dokumen operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai pilar utama dan modal sosial pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat kabupaten, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perguruan tinggi, petani, nelayan, industri pengolahan, pedagang, penyedia jasa, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

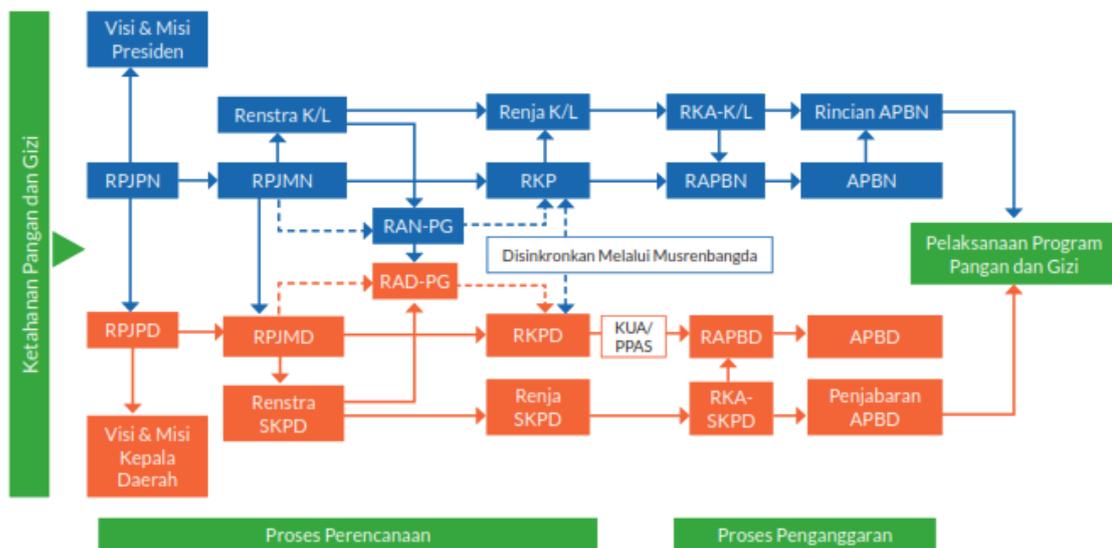
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong merupakan visi Presiden 2020-2024 yang salah satunya dicapai dengan misi pembangunan SDM dan infrastruktur terutama infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini menempatkan pembangunan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, pemerintah daerah telah diamanatkan menyusun beberapa kebijakan atau dokumen turunan yang ditetapkan ke dalam peraturan yang berlaku di daerah sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi atas kebijakan tersebut.

RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan RPJMD. RPJMN tahun 2020-

2024 merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Posisi RAD-PG terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya dapat menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti: Percepatan Penurunan Stunting, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

RAD-PG yang disusun pemerintah daerah pada dasarnya merupakan penajaman program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra SKPD, sehingga dapat diacu untuk menyusun Renja SKPD dan RKPD. Adapun gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kedudukan RAD-PG dalam integrasi dengan Pembangunan Nasional dan Daerah
Sumber: Bappenas tahun 2020, dimodifikasi

1.3. Tujuan Penyusunan RAD-PG

Tujuan umum penyusunan RAD-PG Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2026 adalah untuk menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain untuk

berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara itu, tujuan khususnya adalah:

- a. meningkatkan pemahaman seluruh *stakeholders* dan masyarakat dalam peran sertanya untuk pemantapan ketahanan pangan dan gizi.
- b. meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar: (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.
- c. meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan secara terinci dengan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

Dasar hukum Penyusunan RAD-PG adalah:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 tahun 2016 Tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

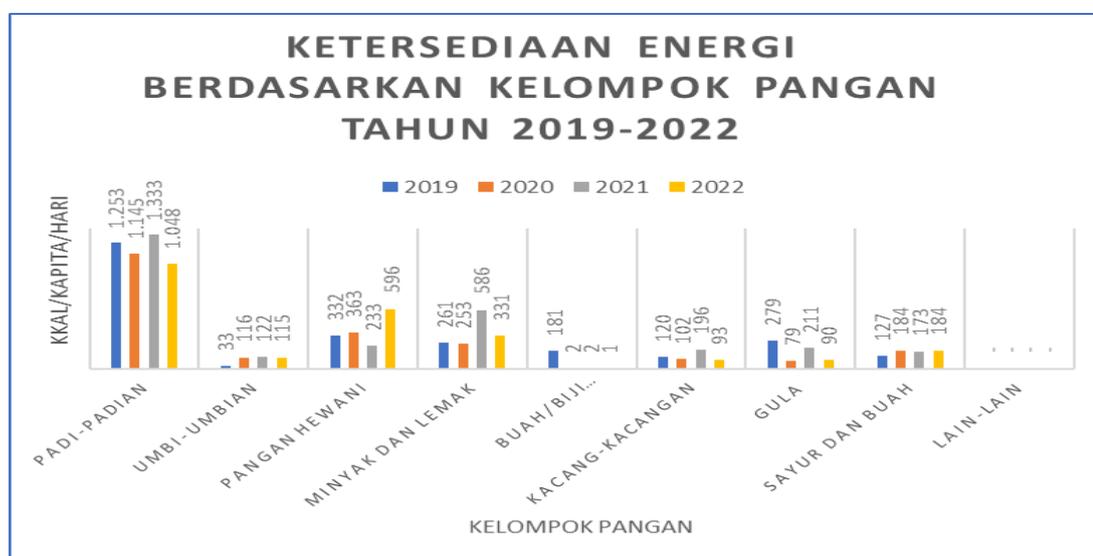
BAB II

ANALISIS SITUASI

2.1. Situasi Saat ini

2.1.1 Ketersediaan Pangan

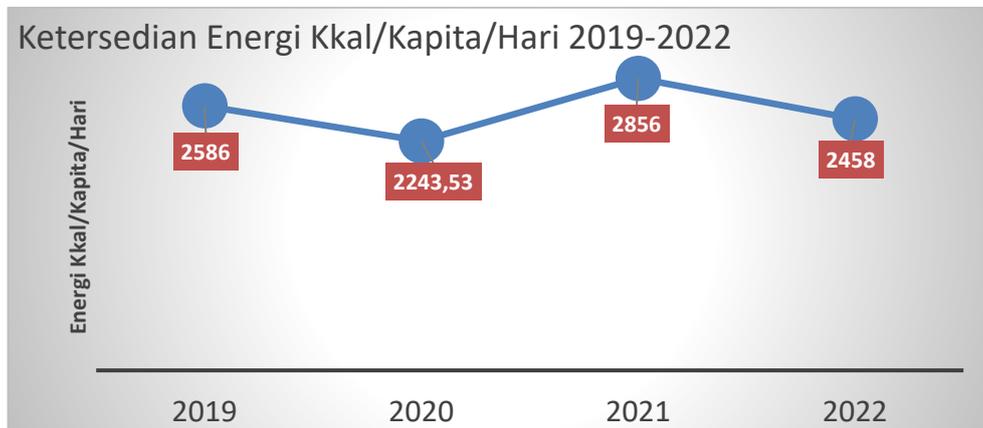
Ketersediaan Energi dan Protein perkapita merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk di konsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari dan protein dalam satuan gram/kapita/hari. Ketersediaan energi kelompok pangan padi-padian yang terdiri atas beras, jagung dan gandum memiliki nilai ketersediaan yang tertinggi dibandingkan kelompok pangan lainnya, selanjutnya diikuti kelompok pangan hewani dan kelompok pangan minyak dan lemak (Gambar 2).



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022 (diolah)

Gambar 2. Ketersediaan Energi Berdasarkan Kelompok Pangan 2019-2022 (Kkal/Kapita/Hari)

Perkembangan ketersediaan energi dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami fluktuatif. Di tahun 2022 ketersediaan energi hanya 2.458 Kkal/kapita/hari mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 2.856 Kkal/kapita/hari sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Namun demikian ketersediaan energi tersebut telah melebihi kebutuhan konsumsi energi di tahun 2021 yang hanya 2100 Kkal/kapita/hari.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022 (diolah)
 Gambar 3. Perkembangan Ketersediaan energi 2019-2022 Kutai Kartanegara

Protein adalah zat pembangun yang sangat dibutuhkan manusia, data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa ketersediaan sumber protein terbesar berasal dari Ikan, kemudian disusul padi-padian dan buah/biji berminyak dan telur. Adapun ketersediaan protein yang berasal dari berbagai kelompok pangan disajikan pada tabel 1.

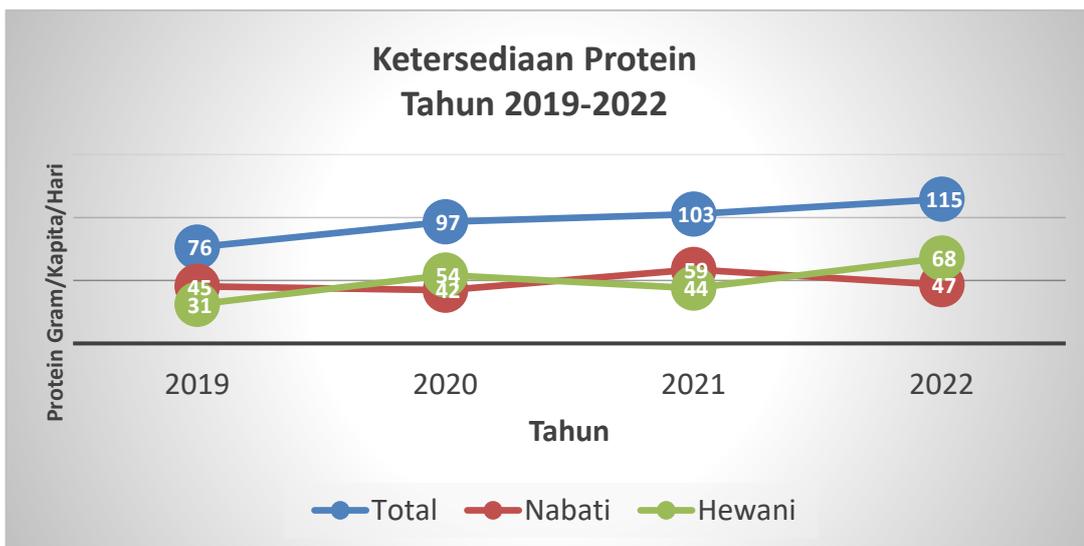
Tabel 1. Ketersediaan Protein Berdasarkan Kelompok Pangan 2019-2022 (gram/kapita/hari)

Kelompok Pangan	Ketersediaan Protein			
	Gram/Kapita/Hari			
	2019	2020	2021	2022
Padi-padian	29,70	27,12	33	34
Makanan berpati	0,19	0,76	1	1
Gula	0,06	0,07	0	0
Buah biji berminyak	10,36	10,33	20	7
Buah-buahan	0,93	1,43	1	1
Sayur-sayuran	4,12	2,57	4	3
Daging	5,34	7,64	1	6
Telur	4,53	2,32	2	7
Susu	0,93	0,03	0	0
Ikan	20,18	44,32	41	55
Minyak dan Lemak	0,06	0,00	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022 (diolah)

Perkembangan ketersediaan energi di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Di tahun 2019 hanya mencapai 76 gram/kapita/hari terus mengalami kenaikan hingga mencapai 115 gram/kapita/hari di tahun 2022. Sumber ketersediaan protein berasal dari nabati dan hewani. Ketersediaan protein hewani mencapai 68 gram/kapita/hari di tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya

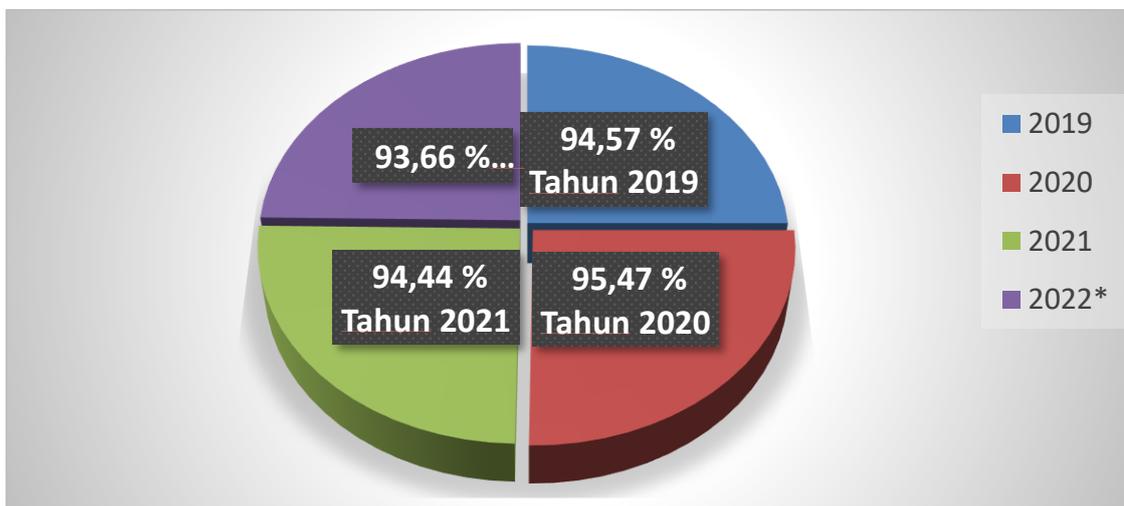
mencapai 44 gram/kapita/hari. sedangkan ketersediaan protein nabati mengalami penurunan, di tahun 2021 mencapai 59 gram/kapita/hari mengalami penurunan menjadi 47 gram/kapita/hari di tahun 2022 (gambar 4).



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022 (diolah)

Gambar 4. Perkembangan Ketersediaan Protein 2019-2022 Kutai Kartanegara

Ketersediaan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022 diperoleh dari hasil analisis lanjutan Neraca Bahan Makanan (NBM). Pola Pangan Harapan di Kutai Kartanegara di tahun 2022 bernilai 93,66 % yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 mencapai 94,44 %. Ketersediaan PPH tersebut masih rendah dibandingkan PPH ideal, yaitu 100 % sebagaimana disajikan pada Gambar 5



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022 (diolah)

Gambar 5. Perkembangan Ketersediaan PPH 2019-2022 Kutai Kartanegara

2.1.2. Keterjangkauan Pangan

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, dalam pemenuhannya harus memperhatikan keberagaman jenis (diversifikasi) dan jumlah pangan yang dikonsumsi masyarakat sesuai anjuran. Sehubungan hal tersebut Kabupaten Kutai Kartanegara telah memenuhi target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Selama kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2022 ketersediaan energi telah mampu memenuhi ketersediaan ideal sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Sementara itu, pada ketersediaan protein telah pula melampaui target nasional dengan capaian di atas 57 gram/kapita/hari sebagaimana disajikan di Tabel 2.

Tabel 2. Ketersediaan, tingkat ketersediaan energi dan Protein serta capaiannya

Tahun	Ketersediaan Energi Kkal/Kap/Hari	Tingkat Ketersediaan Kkal/Kap/Hari	Capaian (%)	Ketersediaan Protein Gram/Kap/Hari	Tingkat Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	Capaian (%)
2019	2585	2100	123	93,16	57	163
2020	2244	2100	107	98,09	57	172
2021	2856	2100	136	102,60	57	180
2022	2458	2100	117	91,60	57	161

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kukar, 2022 (Diolah)

Di tahun 2019 dan di tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan stok atau cadangan beras yang merupakan hasil kerjasama dengan bulog. Di tahun 2019 pengadaan cadangan beras sebesar 151.549 kg dan di Tahun 2021 sebesar 127.959 kg. Cadangan beras di tahun 2019 telah habis didistribusikan di tahun 2020 pada masyarakat yang mengalami berbagai peristiwa bencana seperti yang disajikan pada Tabel 3. Selanjutnya di tahun 2021 cadangan beras yang disediakan disalurkan di tahun 2021 hingga tanggal 27 Mei 2022 tersisa sebesar 73.496 kg yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Cadangan dan Distribusi Beras Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2022

Tahun	Stok Beras	Penyaluran	Kondisi	Lokasi
2019	151.549	5004	Antisipasi Desa rawan Pangan	Dusun Serbaya
2020		2520	Bencana Longsor	Desa Mulawarman
		1071	Bencana Kebakaran	Desa Kota bangun Ulu
		1107	Bencana Kebakaran	Desa Loa Kulu kota

		3195	Korban Bencana Banjir	Kel. Sungai Merdeka
		10.000	Masyarakat dampak Covid 19	Kec. Tenggarong
		31.000	Masyarakat dampak Covid 19	Kec. Tenggarong
		22.900	Masyarakat dampak Covid 19	Kec. Loa Kulu
		10.875	Banjir dan Longsor	D. makarti Marangkayu
		200	Kebakaran	Desa Sebulu Ulur
		288	Kebakaran	Desa Sepakat L. kulu
		23.289	Zona Merah Covid 19	Kel. Loa Tebu
2021	127.959	558	Kebakaran	Kel. Loa Tebu
		218	Isoman Covid	Kel. Melayu
		201.6	Isoman Covid	Kel Baru
		18.300	Banjir dan Longsor	Kec. Samboja
		315	Banjir	Desa Jonggon Loa Kulu
2022		34.870	Banjir	Kec. Tabang
Pengeluaran Hingga 27 Mei 2022		54.463		
Sisa Stok 73.496 kg				

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Perkembangan harga dan stabilitas harga bahan pokok di tahun 2018 – 2021 di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fruktuatif. Terdapat 4 komoditi yang harganya tidak stabil selama 4 (empat) tahun terakhir adalah :Cabe merah keriting , cabe merah rawit, daging ayam dan cabe besar, minyak goreng dan tepung curah. Data ketidakstabilan harga ini dapat digunakan sebagai bahan untuk intervensi pasar guna menjaga agar harga bahan pangan di tingkat masyarakat tidak mengalami kenaikan harga yang tinggi sehingga mengganggu daya beli masyarakat dalam memperolehnya. Kenaikan harga cenderung naik di bulan Desember, kemudian perlahan mengalami penurunan di awal tahun dan mulai naik kembali saat memasuki bulan suci Ramadhan.

2.1.3 Pemanfaatan Pangan

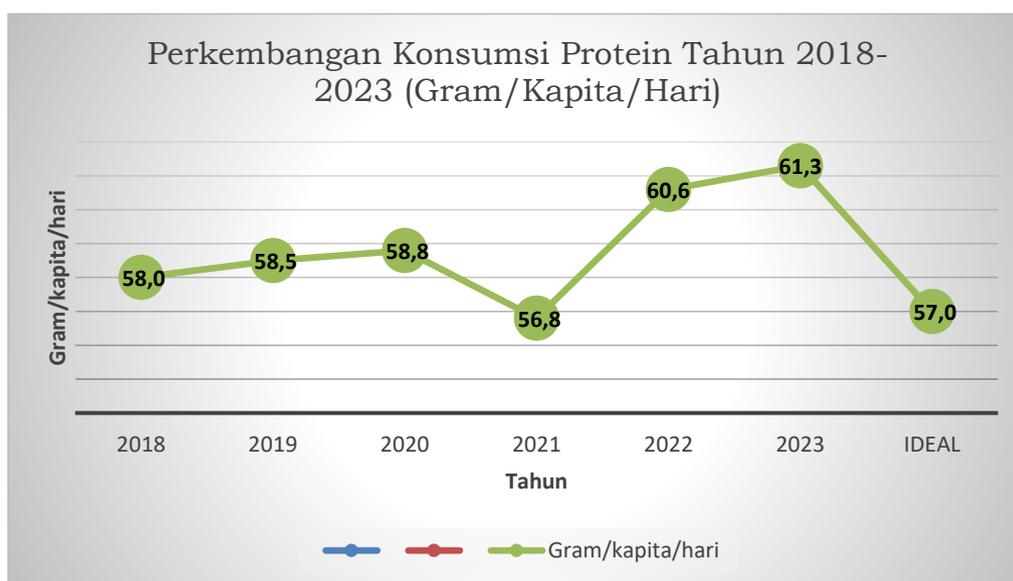
Konsumsi pangan yang beragam sangat penting, oleh karena tubuh manusia memerlukan beragam jenis zat gizi yang bersumber dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Perkembangan konsumsi energi masyarakat Kutai Kartanegara mengalami kenaikan sejak tahun 2018

hingga tahun 2020 kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2022 dan naik kembali di tahun 2023, namun nilai yang diperoleh masih berada di bawah ideal, yaitu 2100 Kkal/Kapita/Hari (Gambar 6)



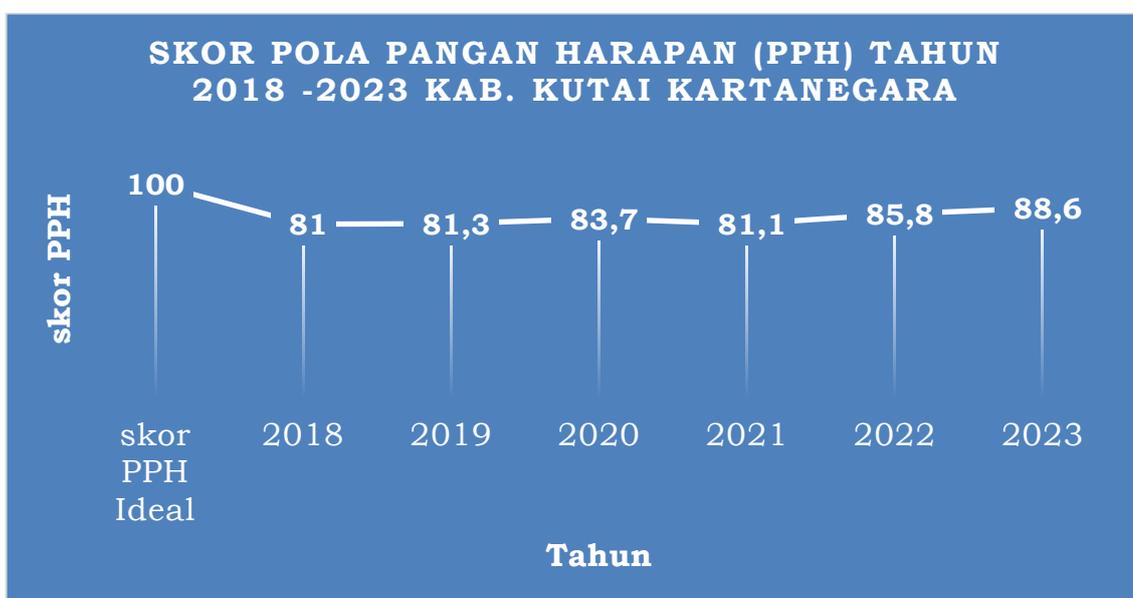
Gambar 6. Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2018 s.d 2023

Perkembangan konsumsi protein tahun 2018 hingga tahun 2020 terus meningkat, tetapi mengalami penurunan di tahun 2021, kemudian naik kembali di tahun 2022 hingga 2023. Nilai konsumsi protein masyarakat Kutai Kartanegara sejak tahun 2018 hingga 2020 telah melebihi anjuran (ideal), yaitu 57 gram/kapita/hari dan di tahun 2021 mendekati nilai anjuran (56,8 gram/kapita/hari) dan di tahun 2022 hingga 2023 naik kembali sehingga melebihi nilai anjuran, yaitu 57 gram/kapita/hari. Adapun perkembangan konsumsi energi dan protein tahun 2010 s.d 2023 disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Perkembangan Konsumsi Protein Tahun 2018 s.d 2023

Kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan merupakan pendekatan untuk mengukur keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. PPH merupakan pemenuhan keseimbangan gizi yang didasarkan pada konsep triguna pangan (Karbohidrat dan lemak sumber zat tenaga, Protein sumber zat pembangun, dan vitamin mineral sumber zat pengatur yang berdasarkan keseimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi atau konsep gizi seimbang, di mana keseimbangan antara asupan (konsumsi) zat gizi dan kebutuhannya, maupun jumlahnya antar waktu makan. Pada gambar 8 disajikan bahwa PPH konsumsi di tahun 2022 hingga 2023 mengalami kenaikan.



Gambar 8. Perkembangan Pola Pangan Harapan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018 s.d 2023.

2.1.4. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi

Kondisi kekinian kelembagaan yang terkait pangan dan gizi di tingkat kabupaten Kutai Kartanegara berada di masing-masing OPD yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi. Pada RAD-PG Tahun 2017-2021 telah dibentuk Tim RAD_PG kabupaten yang berfungsi mengoordinasikan semua program dan kegiatan yang berhubungan dengan pangan dan gizi termasuk tim pemantaun dan evaluasi RAD-PG yang di SK-kan oleh Bupati. Akan tetapi tim tersebut hasil kerjanya belum optimal.

2.2 Tantangan

2.2.1 Ketersediaan Pangan

Pada pilar ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara tantangan yang dihadapi adalah Alih fungsi lahan pertanian dan produksi komoditi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dan masih belum stabil (Tabel 4), selain itu pengembangan produksi pertanian dengan pengembangan pupuk, penguasaan benih padi, harga jual yang menguntungkan, dan Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan yang masih belum mencapai di atas 100, hal ini tentunya masih merupakan pekerjaan rumah yang segera dicarikan solusinya.

Tabel 4. Produksi Komoditi Padi dan Palawija 2018 s.d 2022 Kukar

NO	Komoditi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	144.048	121.203	110.940	104.442	105.026
2	Jagung	13.377	23.391	9.297	5.717	6.982
3	Kedelai	68	35	13	51	23
4	Kacang Tanah	444	268	368	378	185
5	Kacang Hijau	133	115	106	154	31
6	Ubi Kayu	27.624	23.268	22.244	18.691	16.928
7	Ubi Jalar	4.359	4.853	6.444	8.054	5.405

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan 2023

2.2.2 Keterjangkauan Pangan

Masih terdapatnya desa rentan pangan kurang lebih 10,4 % di tahun 2022 menjadi tantangan di aspek keterjangkauan bahan pangan sebagaimana disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Desa Rawan Pangan di Kukar

Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa Rentan Pangan	Prosentase (%)
2019	5	11	5,7
2020	7	25	12,9
2021	9	20	10,4
2022	9	20	10,4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kukar, 2022 (diolah)

Kemiskinan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keterjangkauan bahan pangan. Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2022 memiliki Tingkat Kemiskinan lebih tinggi dari Kaltim sebesar 7,96 persen dan lebih rendah dibandingkan dengan Nasional.

2.2.3. Pemanfaatan Pangan

Skor PPH per kelompok pangan menunjukkan bahwa kontribusi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan bernilai rendah atau belum memenuhi anjuran sehingga kedepannya perlu peningkatan konsumsi pada kelompok pangan tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan skor PPH Kab. Kutai Kartanegara Per Kolompok Pangan Tahun 2018-2023

No	Kelompok Pangan	Skor PPH Ideal	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)					
			Skor PPH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	25	25	25,0	25,0	25,0	24,2	24,8
2	Umbi-umbian	2,5	1	0,9	0,9	1,2	1,2	1,1
3	Pangan Hewani	24,0	24	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	5,0	5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
6	Kacang-kacangan	10,0	5	4,4	5,0	5,0	5,4	6,1
7	Gula	2,5	3	2,4	2,4	2,5	2,2	2,4
8	Sayur dan Buah	30,0	18	19,4	21,0	18,3	23,6	25,0
9	Lain-lain	,-	-	-	-	-	-	-
	Total	100	81	81,3	83,7	81,1	85,8	88,6

Sumber: Susenas, diolah dan dijustifikasi DKP Kukar 2023

Perkembangan skor PPH tahun 2018 hingga 2020 memiliki kecenderungan meningkat, berturut-turut 81; 81,3; dan 83,7 akan tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu 81,1. Kemudian naik kembali di tahun 2022 (85,8) hingga 2023 (88,6) (Gambar 8). Nilai PPH sejak 2018 hingga 2023 masih berada di bawah ajuran, yaitu PPH 100 (ideal). Hal ini mengindikasikan bahwa keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kutai Kartanegara masih belum sesuai anjuran. Konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayur dan buah masih perlu ditingkatkan.

2.2.4. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi

Tantangan yang masih dihadapi pada penguatan kelembagaan pangan dan gizi adalah:

- koordinasi dan kolaborasi program lintas perangkat daerah dalam menuntaskan masalah-masalah di aspek pangan dan gizi masih belum optimal.
- masih minimnya pelibatan sektor non-pemerintah di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dibidang pangan dan gizi.

BAB III
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan RAD-PG Kutai Kartanegara Tahun 2024-2026 adalah:

- a. mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi kabupaten Kutai Kartanegara melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
- b. meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga;
- c. memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menajamkan program/ kegiatan multisektor untuk pencapaian target TPB dan RPJMD 2021-2026 dalam Pembangunan pangan dan gizi.

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Kutai Kartanegara adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang IDAMAN (Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri) serta sehat, cerdas dan produktif. RAD-PG disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2026 sebagaimana disajikan pada Table 5, dan juga sebagai instrumen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Indikator pembangunan bidang pangan dan gizi sebagaimana tercantum pada Tabel 7, sepatutnya diacu dan diselaraskan pelaksanaannya di daerah melalui penajaman aksi yang dirumuskan pada RAD-PG sesuai kondisi dan kebutuhan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 7. Indikator dan target Pembangunan Bidang pangan dan Gizi Dalam RPJMD tahun 2021-2026

No	Indikator	Baseline 2022	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Ket
<i>Intermediete Outcome</i>						
1	Ketersediaan beras (ribu ton)	64,27	69,27	85.245	85.070	
2	Ketersediaan protein hewani (ton)	26,96	27,37	-	-	
3	Peningkatan produksi buah (ton)	70.695	87.578	89.081	90.633	
4	Peningkatan produksi sayuran (ton)	33.047	22.541	22.927	23.327	
5	Skor Pola Pangan Harapan	85,8	87,8	88.00	90.00	
6	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kap/hari)	1.921	2,100	2,200	2,225	
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kap/hari)	60,6	57	57,20	57,25	

8	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU) Kutai Kartanegara	18,2	8,07	6,66	5,24	
9	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Kalimantan Timur)	3,46	2,85	2,43	2,02	
10	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	5,7	5,9	6,0	6,1	
11	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	32,7	3,1	3,2	3,3	
12	Konsumsi Protein Asal ternak (gram/kapita/tahun) (Susu, Telur)	28,85	24,0	48,1	48,5	
13	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/tahun)	95,0	316,3	80	80,5	
14	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	90	85-95	92	93	
15	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	0	100%	-	-	
16	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76	86	-	-	
<i>Outcome</i>						
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16	14	13,8	13,6	
2	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	7,1	7	6,9	6,8	
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	0	21,8	21,3	20,8	

3.2. Ruang Lingkup

RAD-PG Kutai Kartanegara difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program atau kegiatan dalam pencapaian target pembangunan rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun pangan dan gizi yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2021-2026 serta dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi dan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu: 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;

3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); dan 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi. Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor ditingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip *no one left behind* dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan.

3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

RAD-PG di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instrumen koordinasi yang disusun dan diimplementasikan oleh pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten yang diterjemahkan dari RAN-PG di Pusat dan RAD-PG tingkat provinsi. Beberapa penguatan dalam rencana aksi pangan dan gizi terlihat dalam aspek penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPJMD. Selain itu rencana aksi telah menggunakan pendekatan kesetaraan gender dalam menyusun aksi serta mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi kegawatdaruratan seperti pandemik COVID-19.

3.3.1 Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di daerah dalam situasi Darurat

Pemerintah daerah dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi.

Di Tahun 2019 dan di Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan stok atau cadangan beras yang merupakan hasil kerjasama dengan bulog. Di Tahun 2019 pengadaan cadangan beras sebesar 151.549 kg dan di Tahun 2021 sebesar 127.959 kg. Cadangan beras di tahun 2019 telah habis didistribusikan di tahun 2020 pada masyarakat yang mengalami berbagai peristiwa bencana. Selanjutnya di tahun 2021 cadangan beras yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Ketahanan

Pangan disalurkan di Tahun 2021 hingga tanggal 27 Mei 2022 tersisa sebesar 73.496 kg sebagaimana disajikan pada Tabel 3 BAB II.

3.3.2. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam *Global Nutrition Report 2020* disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan *Outcome* gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program /intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi. Kegiatan yang berkaitan dengan gender tertentu telah dimasukkan dalam matriks dan beberapa indikator akan diukur dan dipilah berdasarkan jenis kelamin jika relevan. Dengan demikian, intervensi gizi yang disusun baik spesifik maupun sensitif diharapkan mampu merespon secara tepat berbagai perbedaan kebutuhan gizi yang timbul dari kombinasi berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta faktor geografis.

BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI

4.1. Strategi dan Aksi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu: (1) Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi; (2) integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial; (3) jaminan sosial dan pendidikan gizi; (4) Investasi untuk perbaikan gizi; (5) lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; (6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, disusun pedoman penyusunan RAN-PG yang diterjemahkan ke RAD-PG guna mewujudkan SDM sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing. Sumber daya yang digunakan telah tertuang dalam RPJMN dan RKP di pusat dan RPJMD dan RKPD di daerah. RAN-PG dan RAD-PG berisi tujuan strategis, strategi, dan aksi yang menajamkan program dan kegiatan untuk operasionalisasi pencapaian tujuan RPJMN dan RPJMD, disertai indikator dan target sebagai outputnya. Strategi dan aksi penajaman diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang dapat menurunkan *undernutritions* (*stunting*, *wasting*, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular.

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
 - a. peningkatan produksi pangan yang beragam;
 - b. penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
 - c. pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - d. penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*); dan
 - e. pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
 - a. peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
 - b. perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;

- c. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
 - d. pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
 - e. penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat;
 - f. penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
 - g. pengembangan sistem logistik pangan;
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)
- a. penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
 - b. pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan Pangan setiap tahun;
 - c. edukasi pola konsumsi Pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
 - d. peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;
 - e. peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
 - f. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;
 - g. peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - h. pengendalian pemborosan pangan (food waste);
 - i. portifikasi pada pangan tertentu; dan
 - j. peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi
- a. penguatan kelembagaan ketahanan pangan dan gizi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan;
 - b. penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah;
 - c. penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi;

- d. penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
- e. penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

Sementara itu, tujuan strategis dan strategi ketahanan pangan dan gizi yang berperan dalam perubahan yang diharapkan berupa *intermediate outcome dan outcome* sebagaimana pada tabel 5. Selanjutnya Strategi ketahanan pangan dan gizi tersebut telah dirincikan secara detail pada matriks lampiran 2 yang terdiri dari tujuan strategis, strategi, aksi, target, indikator, dan pelaksana (koordinator dan sektor lainnya yang terlibat).

4.2. Pengorganisasian

Susunan keanggotaan Forum Koordinasi RAD-PG Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

I. Forum Pengarah, terdiri atas

- a. Penanggung Jawab : Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Sekretaris : Asisten II
- d. Anggota : Pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan : Kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kependudukan dan keluarga berencana, dan pengawas obat dan makanan

II. Forum Teknis

- a. Ketua : Kepala Bappeda
- b. Sekretaris : (Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan, pertanian dan atau ketahanan pangan
- c. Anggota : kepala bidang terkait dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, Pendidikan, perindustrian, dan sosial

Tugas dan fungsi Forum Pengarah adalah:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- b. menyampaikan RAD-PG dari Bupati kepada Gubernur;
- c. memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
- e. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati kepada Gubernur

Tugas dan Fungsi Forum Teknis sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG
- b. melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum Pengarah;
- c. menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
- d. mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- e. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
- f. menjalan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai dengan masukan Forum pengarah;
- g. mengoordinasikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

4.3. Peran Sektor Non Pemerintah

Sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam penyusunan dokumen atau pendampingan RAD-PG di daerah.
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan dan Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal.
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya.
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka sosial control terhadap program pemerintah daerah di bidang pangan dan gizi serta diseminasi hasilnya.
6. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.

4.4. Pembiayaan

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi untuk menjalankan-Nya memerlukan dukungan dan pengelolaan anggaran. Rencana Aksi pangan dan Gizi perlu mendapatkan kepastian pembiayaan karena akan diacu pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan melalui penajaman program/kegiatan yang sudah ada. Pembiayaan dimaksud dapat berasal dari pemerintah daerah melalui OPD yang terkait maupun melalui sumber lain seperti CSR, donor/mitra pembangunan, serta sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

4.5. Matrik Strategi dan Rencana Aksi Daerah

Adapun Matriks Strategi dan Rencana Aksi Daerah (RAD-PG) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Matriks Strategi dan Rad-PG Tahun 2024-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)			
1	2	3			4	6	7	9	10	12	13	15	17	18	19
A	TS : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman														
	Peningkatan Produksi Pangan Yang Beragam	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Luasan Lahan yang dikelola UPT/BPP	Ha	3	430.000.000	3	430.000.000	3	430.000.000	3	430.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	BPP	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alsintan yang diadakan	Unit	3.012	3.250.000.000	3.012	3.250.000.000	3.012	3.250.000.000	3.012	3.250.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kelompok Tani/Gapoktan, Perweda dan BPP	
			Jumlah Saprodri yang diadakan	Ha	1.300	2.500.000.000	1.300	2.500.000.000	1.300	2.500.000.000	1.300	2.500.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kelompok Tani/Gapoktan, Perweda dan BPP	
			Jumlah Luasan benih padi yang diadakan	Ha	3.600	1.080.000.000	3.600	1.080.000.000	3.600	1.080.000.000	3.600	1.080.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kelompok Tani/Gapoktan, Perweda dan BPP	
			Jumlah Luasan Benih Jagung	Ha	3.000	750.000.000	3.000	750.000.000	3.000	750.000.000	3.000	750.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kelompok Tani/Gapoktan, Perweda dan BPP	
			Jumlah Luasan Palawija (Porang)	Ha	14	500.000.000	14	500.000.000	14	500.000.000	14	500.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kelompok Tani/Gapoktan, Perweda dan BPP	
			Jumlah Luasan Benih Hortikultura	Ha	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kelompok Tani/Gapoktan, Perweda dan BPP	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kelompok Tani, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi, Kementerian Pertanian	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kelompok Tani, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kelompok Tani, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi	
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas	
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas	
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas	
		Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas, Dinas Peternakan dan Peternakan Provinsi.	
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Ekor	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas	
		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas	
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas	
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain												
			<i>Pengadaan bibit Ternak Sapi</i>	Ekor	92	1.105.000.000	92	1.105.000.000	92	1.105.000.000	92	1.105.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Penyedia, Kelompok Tani	
			<i>Pengadaan bibit Ternak Kambing</i>	Ekor	160	800.000.000	160	800.000.000	160	800.000.000	160	800.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Penyedia, Kelompok Tani	
			<i>Pengadaan bibit Ternak Kerbau</i>	Ekor	20	800.000.000	20	800.000.000	20	800.000.000	20	800.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Penyedia, Kelompok Tani	
			<i>Pengadaan bibit Ternak babi</i>	Ekor	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Penyedia, Kelompok Tani	
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Penyedia, Kelompok Tani, Petugas Lapangan	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B yang Dikelola	Dokumen	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Penyedia, Kelompok Tani, Petugas Lapangan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	18	200.000.000	18	200.000.000	18	200.000.000	18	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kelompok Tani, Petugas Lapangan, Dinas Pertanian Provinsi	

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Meter	20.000	6.900.000.000	17.000	6.900.000.000	10.000	6.900.000.000	7.500	6.900.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	23	4.611.000.000	23	4.611.000.000	21	4.611.000.000	19	4.611.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	33.000	10.900.000.000	20.000	11.300.000.000	12.500	10.900.000.000	10.500	10.900.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	5	900.000.000	6	900.000.000	4	900.000.000	3	900.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	35	800.000.000	33	800.000.000	19	800.000.000	19	800.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan kandang	Unit	20	200.000.000	25	200.000.000	30	200.000.000	35	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
			Jumlah dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kalang	Unit	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan pagar pembatas	Meter	15.000	200.000.000	20.000	200.000.000	25.000	200.000.000	30.000	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan gang waw	Unit	13	50.000.000	18	50.000.000	23	50.000.000	28	50.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
			Luas cetak sawah baru dan optimasi lahan Rawa	Ha	11	200.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	65	100.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas Lapangan, Kelompok Tani	
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas Lapangan, Kelompok Tani	
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas Lapangan, Kelompok Tani	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	2.000	1.100.000.000	2.000	1.100.000.000	2.000	1.100.000.000	2.000	1.100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	200	500.000.000	200	500.000.000	200	500.000.000	200	500.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas dan Kelompok Tani	
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	18	300.000.000	18	300.000.000	18	300.000.000	18	300.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas dan Kelompok Tani	
		Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	laporan	85	150.000.000	90	150.000.000	95	150.000.000	95	150.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas dan Kelompok Tani	
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	200	1.000.000.000	200	1.000.000.000	200	1.000.000.000	200	1.000.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas dan Kelompok Tani	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan (Webbing)	Pcs	3.152	788.000.000	3.220	805.000.000	3.260	815.000.000	2.428	607.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan (Kawat Tempirai)	Roll	5.000	1.250.000.000	5.000	1.250.000.000	5.000	1.250.000.000	5.000	1.250.000.000			
			Jumlah Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT Didistribusikan	Unit	500	5.000.000.000	500	5.000.000.000	600	6.000.000.000	600	6.000.000.000			
			Jumlah Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT Didistribusikan	Unit	400	4.000.000.000	300	3.000.000.000	600	6.000.000.000	640	6.400.000.000			
			Jumlah Rumpun dibangun.	Unit.	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000			

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan	
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)				
2	Penyediaan Pangan yang Aman	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Teropong Binocular	Unit.	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000				
			Jumlah Cool Box didistribusikan.	Unit	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000				
			Jumlah Pembudidaya Ikan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Budidaya Ikan	Orang	15	375.000.000	15	375.000.000	15	375.000.000	15	375.000.000				
			Jumlah Unit Hatchery terbangun.	Unit	-	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-				
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan dibebaskan, diruruk dan Pondasi.	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Jumlah Unit Kolam UPR Terbangun	Unit	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000				
			Jumlah Kolam UPR di Rehabilitasi.	Unit	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	4	400.000.000	10	1.000.000.000				
			Jumlah Unit HSRT Terbangun	Unit	20	6.000.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000				
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit HSRT direhabilitasi	Unit	5	750.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	-	-				
			Panjang Jalan Produksi Terbangun	Meter	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-				
			Jumlah Induk Ikan dan Udang Unggul Didistribusikan	Kg	2.000	700.000.000	7.000	2.450.000.000	8.000	2.800.000.000	8.000	2.800.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan			
			Jumlah Pakan Ikan Didistribusikan	Kg	75.600	1.512.000.000	130.000	2.600.000.000	130.000	2.600.000.000	130.000	2.600.000.000				
			Jumlah Benih Ikan Didistribusikan	Ekor	800.000	800.000.000	1.212.000	1.212.000.000	1.202.000	1.202.000.000	1.056.000	1.056.000.000				
			Jumlah Benih Udang Didistribusikan	Ekor	3.000.000	1.050.000.000	8.000.000	2.800.000.000	9.600.000	3.360.000.000	9.600.000	3.360.000.000				
			Jumlah Probiotik. Didistribusikan	Liter	10.000	500.000.000	10.000	500.000.000	10.000	500.000.000	10.000	500.000.000				
			Jumlah Pupuk Didistribusikan	Kg	6.000	60.000.000	6.000	60.000.000	6.000	60.000.000	6.000	60.000.000				
			Jumlah Unit Mesin Pompa Air	Unit	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000				
			Jumlah Unit Keramba Didistribusikan	Unit	50	400.000.000	150	1.200.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000				
			Jumlah Kolam Terpal Didistribusikan	Unit	50	400.000.000	150	1.200.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000				
			Jumlah Unit Kolam BIOFLOK	Unit	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000				
			Panjang Tanggul Tambak diperbaiki	Meter	5.000	600.000.000	5.000	600.000.000	5.000	600.000.000	5.000	600.000.000				
			Jumlah Pintu Air Tambak diperbaiki	Unit	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000				
			Jumlah Mesin Pengolah Pakan Didistribusikan	Unit	10	2.500.000.000	10	2.500.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000				
			Jumlah Mesin Penyedot Lumpur Didistribusikan	Unit	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000				
			Panjang Plastik PDE Didistribusikan	Meter	10.000	350.000.000	10.000	350.000.000	10.000	350.000.000	10.000	350.000.000				
			Jmlah Pipa Paralone Didistribusikan	Unit	300	135.000.000	300	135.000.000	300	135.000.000	300	135.000.000				
			Jumlah Kincir Air Didistribusikan	Unit	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000				
			Jumlah Blower Didistribusikan	Unit	8	68.000.000	8	68.000.000	8	68.000.000	8	68.000.000				
			Jumlah Unit Pompa Dap Didistribusikan	Unit	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000				
			Jumlah Unit Genset Didistribusikan	Unit	6	27.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000				
			Jumlah Kapur Didistribusikan	Kg	30.000	36.000.000	30.000	36.000.000	30.000	36.000.000	30.000	36.000.000				
			Jumlah Saponin Didistribusikan	Kg	750	16.500.000	750	16.500.000	750	16.500.000	750	16.500.000				
			Jumlah Artemia Didistribusikan	Kaleng	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000				
			Jumlah Pupuk Cair Didistribusikan	Liter	500	17.500.000	500	17.500.000	500	17.500.000	500	17.500.000				
			Jumlah Benih Rumput Laut Didistribusikan	Kg	10.000	50.000.000	10.000	50.000.000	10.000	50.000.000	10.000	50.000.000				
			Persiapan dan Pematangan Lahan	Ha	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000				
		Jumlah Cool Box Didistribusikan	Unit	50	125.000.000	50	125.000.000	50	125.000.000	50	125.000.000					
		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mesin Pengolahan Didistribusikan	Unit	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan			
			Jumlah Unit Frezeer Didistribusikan	Unit	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000				
		2	Penyediaan Pangan yang Aman	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Budidaya Ikan dimonitoring	Lokasi	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan	
Jumlah Sampel Produk Budidaya Ikan diuji	Sampel				5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan			

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)			
3	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Ton	250	3.000.000.000	250	3.000.000.000,00	250	3.000.000.000,00	250	3.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	Bulog	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Terbangunnya Lumbung Masyarakat dan pendukungnya	Unit	5	1.550.000.000	5	1.550.000.000,00	5	1.550.000.000,00	5	1.550.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
4	Penanganan Kerusakan dan Kehilangan hasil Panen (Food Loss)	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbangunnya Lumbung Masyarakat dan pendukungnya	Unit	3	500.000.000	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
		Penyediaan Infrastruktur Lantai jemur	Terbangunnya Lantai Jemur Lumbung Pangan masyarakat	Unit	6	200.000.000	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya RMU	Unit	1	200.000.000							Dinas Ketahanan Pangan		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	12	4.450.000.000,00	9	7.250.000.000,00	5	3.500.000.000	5	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum		
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	2	10.901.765.000	2	17.750.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum		
		Pembangunan Cek Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	unit			13	9.906.460.000,00	7	6.000.000.000,00	7	6.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
		Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	unit	1	500.000.000	2	1.000.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum		
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	2	2.500.000.000,00	3	3.000.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
		Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit			5	1.000.000.000,00	10	2.000.000.000,00	10	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	dokumen	5	1.925.000.000,00	6	9.600.000.000,00	2	3.968.177.279,00	2	3.968.177.279,00	Dinas Pekerjaan Umum		
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permulaan	Panjang Jaringan Irigasi Permulaan yang Dibangun	Km			9	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	6	22.954.388.240,00	35	114.655.711.910,00		25.000.000.000,00		25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
		Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	Km			1,2	2.500.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Km	2	4.457.670.500,00	40	87.165.526.250,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	16	8.533.443.000,00	75	23.691.400.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km			1,5	300.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum		
		Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	unit			3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
		5	Pengayaan Nilai Gizi Sumber Pangan melalui Biofortifikasi	Penyediaan PDK dan PKMK	Tersedianya PDK dan PKMK	paket	2	1.560.000.000	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	Dinas Kesehatan
....															
dst															
B	TS : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman														
	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	Kkal/Kap/Hari	%	225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
		Pemantauan Stock Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Stock Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)			
1		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Kelestarian Terfasilitasi	Unit	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Peserta Sosialisasi PERDA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN	Orang	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Nelayan Pemilik Alat Tangkap Ilegal dan Destruktif Mendapat Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Nelayan	400	1.000.000.000	400	1.000.000.000	400	1.000.000.000	400	1.000.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Frekuensi Pengawasan Perairan (Patroli)	Kali	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Luas Zona Inti Reservat Diperdalam	M2	10.000	1.000.000.000	20.000	2.000.000.000	-	-	-	-	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Ikan yang di Restocking pada Zona Inti Reservat	Ekor	500.000	500.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000.000	-	-	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pos Pantau	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	-	-	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Pos Pantau/Pengawasan Terbangun	Unit	-	-	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah POKMASWAS Difasilitasi Unit Sarana Pengawasan (Perahu+Mesin Cus+Senter, Life Jacket, GPS).	Kelompok	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Dalam Peningkatan SDM Anggota POKMASWAS	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan dan Kelautan			
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Frekuensi Monitoring Lokasi Budidaya Ikan dan Jenis Ikan Budidaya.	Kali	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	100.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	100.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara		
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	100.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara				
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	225.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara				
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar Desa dan Kecamatan yang dibangun	Unit	7	24.400.000.000	2	6.680.000.000	2	6.055.000.000	5	20.566.024.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara				
Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau Terbangun	Unit	2	1.950.000.000	8	6.850.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	Dinas Perhubungan	Desa dan Kecamatan	Pagu Anggaran		
Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di pelihara	Unit	15	7.650.000.000	5	2.000.000.000	10	175.000.000	10	175.000.000	Dinas Perhubungan	Desa dan Kecamatan	Pagu Anggaran bisa		
Pengawasan Pengoperasian Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai yang beroperasi dan di awasi	Unit	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	Dinas Perhubungan	Pelaku Usaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Anggaran bisa bertambah sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah		
Perluasan Akses Sistem informasi pasar dan harga pangan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Ketersediaan Jenis Data Statistik Perikanan Tangkap	Jenis Data	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan			
		Jumlah Dok. Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan	Dok. Peta	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan			

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)			
2		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Dokumen SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.	Dok	1	50.000.000							Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pembudidaya Ikan Terlayani dalam Penerbitan Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK).	Orang	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Jenis Data Statistik Perikanan Budidaya	Jenis Data	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Profil Kawasan Budidaya Rumpun Laut	Dok.	1	200.000.000							Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Dokumen Tata Ruang Budidaya Ikan (Budidaya Tambak)	Dok.	1	500.000.000							Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Jenis Data Statistik Pengolahan Hasil Perikanan.	Dok	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Menyediakan bahan pangan kepada Lanjut Usia, Anak Telantar, Penyandang Disabilitas termasuk juga pemenuhan kebutuhan pangan siap saji kepada eks ODGJ dalam penelusuran keluarganya	Jumlah lanjut usia, anak telantar, penyandang disabilitas termasuk eks ODGJ yang terpenuhi kebutuhan pangannya	orang / bulan	852	4.070.333.000	1.491	5.723.300.590	200	500.000.000	200	500.000.000	Dinas Sosial	Pemerintah Desa -Dunia Usaha	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	100.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	1	100.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara				
3	Penguatan Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bidang Pangan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	463	1.852.000.000	340	1.360.000.000	250	1.000.000.000	500	2.000.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Jumlah Sarana Penangkapan Ikan Didistribusikan Untuk Masyarakat Miskin	Unit	500	6.250.000.000	500	6.250.000.000	500	6.250.000.000	500	6.250.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan			
		Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM/Koperasi/ melalui Penguatan Daya saing dan kelembagaan : - Fasilitasi Kemudahan Berusaha - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Umkm	140	500.000.000	140	500.000.000	140	500.000.000	140	500.000.000	Diskopukm		Yg difasilitasi merupakan usaha produk makanan
		- Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkeroperasian	orang	90	200.000.000	180	300.000.000	180	300.000.000	180	300.000.000	Diskopukm		9 Orang merupakan peserta yang mengikuti diklat peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkeroperasian yang terkait dengan sektor pangan
			Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian	Koperasi	75	120.000.000	80	120.000.000	85	125.000.000	90	130.000.000	Diskopukm		Merupakan Usaha Sektor lainnya
4	Pengembangan sistem jaringan pengaman sosial pangan dan pemanfaatan jeni pangan yang beragam													
														
		dst													
	Penyediaan dan penyaluran	Melakukan koordinasi lintas OPD dan	Presentase korban yang terpenuhi										KFMFNTRIAN		

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)			
5	Pangan untuk situasi darurat	menyalurkan bantuan logistic pada saat dan pasca situasi darurat bencana	kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah situasi darurat bencana	Kelompok	3.000	1.051.000.000	500	425.000.000	500	425.000.000	500	425.000.000	DINAS SOSIAL	KEPENTINGAN SOSIAL, DINAS SOSIAL PROV, DINAS KETAHANAN PANGAN	
6	Penumbuhan Kemandirian pangan untuk Masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	750.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
		Menyusun Peta Jalan	Tersusunnya Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	1	75.000.000							Dinas Ketahanan Pangan		
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi (Penanganan Kerawanan Pangan)	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani	Desa	25	600.000.000	25	400.000.000	25	400.000.000	25	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Investigasi Untuk Penanganan Kerawanan Pangan	Dokumen	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rawan Pangan	Desa	5	400.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
		Melakukan Edukasi, Sosialisasi dan optimalisasi penanggulangan bencana (Mitigasi bencana)	Kesiapan masyarakat pada saat pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana	Kelompok	6	378.224.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	Dinas Sosial	TNI, POLRI, DINAS SOSIAL PROV, BPBD, TAGANA	
7	Pengembangan sistem logistik pangan	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Nelayan Dilayani dalam Proses Pelelangan Ikan	Nelayan	1.000	50.000.000	2.000	50.000.000	3000	50.000.000	6000	50.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Melakukan koordinasi lintas OPD dan melaksanakan persiapan logistik pangan di gudang Dinas Sosial	Kesiapan logistik pangan pada saat darurat bencana	Unit	3.000	1.051.000.000	500	425.000.000	500	425.000.000	500	425.000.000	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL PROV, DINAS KETAHANAN PANGAN	
C TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman															
1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	Jumlah Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Bulan	12	-	12	-	12	-	12	-	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perdagangan	berlaku ada Pembiayaan untuk Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dokumen Penyusunan Pemetaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan			-		-		-		-	Dinas Ketahanan Pangan		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas	
2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Menyusun Peta rawan pangan dan Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan	Tersusunnya Peta rentan rawan pangan dan intervensi daerah rentan rawan pangan	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Dinas PLI, DMPD	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen Peta analisis Ketahanan dan kerentanan Pangan (Peta FSVA)	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
		Menyusun Peta Jalan	Tersusunnya Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan TPI dan Pabrik Es	Dokumen	2 (DED dan AMDAL TPI SAMPROJA)	500.000.000	2 (DED dan AMDAL TPI ANGGANA)	500.000.000	-	-	-	-	Dinas Perikanan dan Kelautan		
3	Edukasi Pola Konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sejak usia dini	Luas Lahan Dibebeaskan	M2	20.000	2.000.000.000	20.000	2.000.000.000	-	-	-	-	Dinas Perikanan dan Kelautan			
		Jumlah Unit Jelitv Terbangun	Unit	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan			
		Jumlah Unit Pabrik Fs terbangun	Unit	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan			
		Kegiatan sosialisasi dan Parenting bagi orang tua dan guru PAUD dalam rangka pemenuhan Gizi bagi anak-anak Usia PAUD (Balita)	Tersampainya pesan tentang edukasi pemenuhan gizi kepada orang tua dan guru PAUD	Orang	439	300.000.000	578		588		792		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Puskesmas	

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan	
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)				
4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan mutu pangan	Penanaman konten pembelajaran terkait gemar makan sayur, ikan dan buah bagi anak usia dini melalui proses belajar yang menyenangkan	Tersampaikan muatan materi pelajaran terkait manfaat sayuran, ikan dan buah-buahan kepada peserta didik PAUD melalui model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan	Lembaga	573	397.549.000	578		580		580		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita, dan kelompok rentan rawan pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Peningkatan Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi pangan	Kelompok	30	825.000.000	30	825.000.000	30	825.000.000	30	825.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kelompok Wanita		
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersusunnya Dokumen PPH Konsumsi	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok yang mendapat pembinaan; Festival Pangan Lokal yang diikuti/diadakan	Kelompok	30	600.000.000	30	600.000.000	30	600.000.000	30	600.000.000	Dinas Ketahanan Pangan			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Konsumsi perkapita per tahun	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan			
		Pemberian Makanan Tambahan dalam upaya pemenuhan asupan Gizi pada jenjang PAUD yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKab) atau sumber dana lainnya														
		Pemberian Makanan Tambahan dalam upaya pemenuhan asupan Gizi pada jenjang PAUD yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKab) atau sumber dana lainnya	Peserta didik PAUD mendapatkan tambahan asupan makanan yang bernilai gizi tinggi minimal sekali dalam sebulan	Siswa	10.500	1.006.425.763	11.735		12.235		13.035	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah			
6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan makanan pendamping Air Susu Ibu (MPASI) berbasis pangan lokal	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Cakupan ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan	persen	63,1	-	65	269.198.400	65	300.000.000	70	300.000.000	Dinas Kesehatan			
		...	Cakupan Baduta yang mendapatkan MPASI (pangan lokal)	persen	100	-	80	654.900.000	80	700.000.000	80	700.000.000	Dinas Kesehatan			
7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensinya dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita, PMBA, PAGT dan PTI GB	persen	70,0	1.121.712.000	60	1.062.118.000	65	1.052.704.000	70	1.052.704.000	Dinas Kesehatan			
			Cakupan sasaran balita yang diinput melalui ePPGBM	persen	100	279.792.000	80	279.792.000	90	279.792.000	100	279.792.000	Dinas Kesehatan			
			Cakupan ibu hamil yang mendapatkan suplementasi gizi (Tablet Tambah Darah)	persen	89	87.504.000	95	87.504.000	95	87.504.000	95	87.504.000	Dinas Kesehatan			
			Cakupan remaja puteri yang mendapatkan suplementasi gizi (Tablet Tambah Darah)	persen	47	65.852.000	50	70.586.000	55	80.000.000	60	80.000.000	Dinas Kesehatan			
			Cakupan ibu hami KEK dan balita KEP yang mendapatkan makanan tambahan	persen	94	2.945.140.000	100	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan			
			Penyediaan Infrastruktur Sarana Air bersih	Terbangunnya dan Peningkatan sarana penunjang berupa IPA, Reservoir, Jaringan pipa air bersih dll untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat	Liter/Detik	345	93.300.000.000	32	21.950.000.000	7,5	20.500.000.000	7,5	4.500.000.000	Dinas Perkim	PDAM dan KPSPAM	
					Sumbangan Rumah	1.073	7.150.000.000	1.270	18.969.079.842	500	3.000.000.000	500	1.500.000.000	Dinas Perkim	KPSPAM	
8	Pengendalian Pemborosan Pangan														
		...														
		dst														
9	Penambahan Jenis dan komposisi zat gizi (Fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi														
		...														
		dst														

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan	
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)				
10	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk pangan segar yang difasilitasi untuk sertifikasi	Produk	-	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan			
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk pangan segar yang difasilitasi untuk mendapat Labl Aman	Produk	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan			
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang mendapat rekomendasi	Rekomendasi	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat uji dan Jenis sampel yang diuji	Uji/Sampel	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan			
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas		
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas		
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	70	75.000.000	70	75.000.000	70	75.000.000	70	75.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas		
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas dan Masyarakat		
		Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	Petugas dan Masyarakat		
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Persyaratan Mutu	Orang	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan			
D	TS 4 : Peningkatan Kelembagaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman															
	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan dan Gizi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok yang mendapat pembinaan; Festival Pangan Lokal yang diikuti/diadakan	Kelompok	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	Dinas Kketahanan Pangan	Kelompok Wanita		
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar yang Teregister	Pelaku Usaha	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan			
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan di kecamatan dan Desa/kelurahan (BPP, Posluhtan, Taman Teknologi Pertanian dan P4S) yang di bina dan ditumbuhkan	Kelembagaan Penyuluhan	73	3.000.000.000	73	3.000.000.000	73	3.000.000.000	73	3.000.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	BPP, Posluhtan, Taman Teknologi Pertanian dan P4S		
			Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	BPP	19		19		19		19		Dinas Pertanian dan Peternakan	BPP, Poktan dan Gapoktan		
			Rapat Teknis BPP	BPP	19		19		19		19		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	BPP dan Distanak Kabupaten		
			Pelatihan Dasar Penyuluh ASN dan Swadaya	Orang	100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	PPL, BPP dan Distanak Kabupaten		
			Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh	Orang	100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	PPL, BPP dan Distanak Kabupaten		
			Pembinaan dan Supervisi Penyuluh Pertanian	Bpp	19		19		19		19		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	BPP dan Distanak Kabupaten		
			Pengembangan dan Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa/kelurahan	Posluhdes	60		70		80		90		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	Poktan, Gapoktan, Desa, BPP dan Distanak Kabupaten		
			Pengembangan dan penumbuhan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)	P4S	4		5		6		7		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	P4S, BPP dan Distanak Kabupaten		
			Pelaksanaan Diseminasi Teknologi di Taman Teknologi Pertanian Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	TTP	1		1		1		1		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	Poktan, Gapoktan, BPP, Taman Teknologi Pertanian dan Distanak Kabupaten		
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani yg mendapatkan pelatihan/Pembinaan/ pendampingan/penumbuhan	Kelembagaan Petani	2.743	2.200.000.000	2.743	2.200.000.000	2.743	2.200.000.000	2.743	2.200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	Poktan, Gapoktan dan BPP	
			Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok Tani	Kelompok Tani Dewasa	2.450		2.500		2.550		2.600		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	Poktan, Gapoktan dan BPP		
	Pembinaan dn Penumbuhan Kelompok Wanita Tani	Kelompok Wanita Tani	170		180		195		200		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten	KWT, Gapoktan dan BPP				

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan		
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)					
1		Pembinaan dan penumbuhan Kelompok Taruna Tani (Petani Milenial)	Pembinaan dan penumbuhan Kelompok Taruna Tani (Petani Milenial)	Kelompok Taruna Tani	30		35		40		45			Kelompok Tani Milenial, Gapoktan dan BPP			
			Fasilitasi dan Pendampingan Kelompok KTNA (Menghadiri Rembug, Peda dan Penas)	KTNA	1		1		1		1				KTNA, Gapoktan, BPP dan Dinas Pertanian		
			Pembinaan dan penumbuhan Asosiasi Petani	Asosiasi Petani	2		2		2		2				Poktan, Gapoktan, BPP dan Dinas Pertanian		
			Pembinaan dan Penumbuhan Gapoktan	Gapoktan	160		165		170		175				Poktan, Gapoktan, BPP dan Dinas Pertanian		
			Lomba Asah Terampil Petani	Kelompok Tani	170		180		195		200				Poktan, Gapoktan, BPP dan Dinas Pertanian		
			Kontes Produk Pertanian	Kelompok Tani	30		35		40		45				Poktan, Gapoktan, BPP dan Dinas Pertanian		
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit													
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang mendapatkan sarana/prasarana Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan Penyuluhan	5	2.000.000.000	4	1.600.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000		Dinas Pertanian dan Peternakan	BPP dan Dinas Pertanian		
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di BPP	BPP	19		19		19		19				BPP dan Dinas Pertanian		
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	Posludhes	60		70		80		90				Poktan, Gapoktan, BPP dan Dinas Pertanian		
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pusat pelatihan Perdesaan Swadaya (P4S)	P4S	4		5		6		7				P4S, Poktan, Gapoktan, BPP dan Dinas Pertanian		
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Tama Teknologi Pertanian (TTP) Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Sabaruga	TTP	1		1		1		1				TTP, BPP dan Distanak		
			Pembangunan Pondok Pertemuan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	Posludhes	5		5		5		5						
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Pembinaan dan Pendampingan Kios Saprodi	Kios Saprodi	149	745.000.000	164	300.000.000	179	300.000.000	194	300.000.000		Dinas Pertanian dan Peternakan	BPP dan Dinas Pertanian		
			Pengembangan dan Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)	LKMA	116		121		126		131				BPP dan Dinas Pertanian		
			Pengembangan dan penumbuhan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	UPJA	27		32		37		42				BPP dan Dinas Pertanian		
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	6		11	300.000.000	16	300.000.000	21	300.000.000		Dinas Pertanian dan Peternakan	BPP dan Dinas Pertanian		
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB Berbadan Hukum	KUB	100	300.000.000	100	300.000.000	50	150.000.000	86	258.000.000		Dinas Perikanan dan Kelautan			
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Dokumen SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT.	Dok	1	50.000.000	-	-	-	-	-		Dinas Perikanan dan Kelautan			
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Kapal Nelayan Difasilitasi dalam penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.	Unit	1.500	375.000.000	2.000	500.000.000	2.000	500.000.000	1.000	250.000.000		Dinas Perikanan dan Kelautan		
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Dokumen SOP Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT.		Dok	1	50.000.000								Dinas Perikanan dan Kelautan				
Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Dilayani dalam Penerbitan Dokumen Surat Pendaftaran Kapal		Unit	1.500	50.000.000	2.000	50.000.000	2.000	50.000.000	1.000	50.000.000		Dinas Perikanan dan Kelautan				
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Terdata untuk mendapatkan Kartu KUSUKA		5.176 Orang	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Dinas Perikanan dan Kelautan					
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Terdata untuk mendapatkan Kartu KUSUKA		Orang	1.500	60.000.000	1.500	60.000.000	1.500	60.000.000	1.500	60.000.000		Dinas Perikanan dan Kelautan				

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)			
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Terfasilitasi dalam Mendapatkan Badan Hukum POKDAKAN.	Kelompok	100	200.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	48	96.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah POKDAKAN dinilai	Kelompok	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Difasilitasi dalam Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Orang	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi untuk Mendapatkan Legalitas Kelompok (Badan Hukum Kelompok).	Poklahsar	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan di Zona Hulu	Sarana Kelembagaan	2	896.800.000									
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan (Zona Tengah)	Sarana Kelembagaan	19	7.698.800.000									
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan (Zona Pesisir)	Sarana Kelembagaan	5	2.063.800.000									
		Pembinaan Lembaga Posyandu	Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten	Posyandu	19	279.580.000									
		Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Orang	799	2.539.803.000									
		Pelaksanaan Peningkatan kapasitas KPM	Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia	Orang	160	271.320.000									
2	Penguatan Kemitraan antar pemangku kepentingan	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Peserta Temu Kemitraan.		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Nelayan Terfasilitasi Dalam Sertifikasi Lahan.		200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Peserta Rembug Nelayan		1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Peserta Temu Kemitraan Pembudidaya Ikan		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi dalam Sertifikasi Lahan Pembudidaya Ikan		200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan		500	1.250.000.000	500	1.250.000.000	500	1.250.000.000	500	1.250.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Peserta Rembug Pembudidaya Ikan		1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Gemar Makan Ikan		250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Event Lomba Hasil Olahan Perikanan diikuti.		10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		
			Jumlah Pameran Hasil Olahan Perikanan Diikuti.		3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan		

NO	Strategi	Aksi (Sub Kegiatan)	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat	Keterangan
					Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)	Volume	Alokasi Anggaran (Indikatif) (Rp)			
		Penguatan Kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi publik terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah													
		Pembuatan website pada 58 OPD untuk diseminasi Informasi pada tian? OPD	58 Sebsite OPD	Unit	2	175.000.000	2	436.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	Diskominfo	58 OPD. Desa	
		Monitoring Informasi dan penetapaanda prioritas Komunikasi Pemda (Fasilitasi Kelompencanir Reborn)	1 Laporan	Dokumen	1	50.000.000	4	1.050.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Diskominfo	OPD Teknis, Kecamatan, Desa, Kelompok Tani, Bumdes, PKK dan masyarakat	
		Hubungan media sebagai mitra pemerintah sebagai publikasi pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	60	9.875.357.333	44	9.110.357.333	3	530.357.334	3	530.357.334	Diskominfo	Kerjasama Media (Online/Cetak/Radio/Video/otron/TV)	
		Bimtek, Kompetisi dan sosialisasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah dokumen pengembangan dan pemberdayaan KIM	Dokumen	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Diskominfo	OPD Teknis, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan PKK	
		Layanan Jemput Bola, layanan onlinen dan Layanan Offline	Jumlah Penduduk yang tercatat di Desa/Kel	Jiwa	778.096								Disdukcapil	Desa dan Kecamatan	Pagu Anggaran bisa bertambah sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah
3	Pengendalian dampak pandemi Covid 19 terhadap ketahanan pangan dan gizi dst													
4	Penguatan dimensi gender dalam Pembangunan Pangan dan Gizi dst													
5	Penguatan dukungan riset dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi	*Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kajian Penyediaan Air Bersih di Wilayah/Kecamatan Sekitar IKN Nusantara			300.000.000							Badan Riset dan Inovasi Daerah		
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kebijakan Strategi Penanggulangan Stunting Di Kab. Kutai Kartanegara			150.000.000							Badan Riset dan Inovasi Daerah		
			Kajian Kebijakan Tata Kelola Kelmbagaan (RT, Posyandu, Ketua Adat, PKK) Pada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.			150.000.000							Badan Riset dan Inovasi Daerah		
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kajian Kualitas Air Anak Sungai Mahakam Sebagai Bahan Baku Air Bersih				300.000.000		300.000.000		300.000.000		Badan Riset dan Inovasi Daerah		
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan pangan	Fasilitasi Interkoneksi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dengan Pelaku/Tingkat Pasar				200.000.000						Badan Riset dan Inovasi Daerah		

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi, perlu ditetapkan target atau output yang ingin dicapai, siapa saja yang berperan, apa saja input dan proses yang harus dilakukan. Namun agar lebih terukur dipilih beberapa indikator kinerja utama untuk setiap Perangkat Daerah yang akan terus dipantau pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu. Indikator diperoleh dengan memilih indikator kinerjanya yang berasal dari RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah atau kegiatan lainnya yang relevan terhadap upaya perbaikan gizi dan berkaitan dengan output dan *outcome* yang ingin dicapai. Indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mendorong tercapainya output dan *outcome* dari RAD- PG. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim RAD-PG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.1. Pemantauan

5.1.1. Pemantauan di tingkat Kabupaten

Pemantauan RAD-PG pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten dilakukan dengan cara:

a. Substansi yang dipantau berdasarkan dokumen RAD-PG sebagai berikut:

- 1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A; dan
- 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/ skoring terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B.

Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

b. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh Bappeda atau OPD lain yang ditetapkan kepala daerah.

c. Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten.

d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi C.

5.1.2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi:

- 1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten dapat dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
- 2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri atas beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B;
- 3) Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten dengan peserta pemangku kepentingan terutama OPD dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
- 4) Hasil Workshop : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.

b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)

- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi. Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan. Formulir kunjungan lapangan RAD-PG menggunakan Form Pemantauan D.

- 2) Pelaksana: Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD kabupaten dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
- 3) Hasil kunjungan lapangan: Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

5.2. Evaluasi

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ mid-term dan akhir periode RAD- PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap intermediate outcome (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan outcome (3 indikator pembangunan bidang gizi) seperti yang tercantum pada Tabel 7.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk resmi oleh pemerintah daerah.

5.3. Pelaporan

5.3.1. Mekanisme dan Waktu Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati kepada gubernur. Selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun. Pelaporan RAD-PG oleh Bupati ke tingkat provinsi atas pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Gubernur paling lambat 28 Februari tahun berikutnya.

5.3.2. Isi Laporan

Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meliputi sistematika sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang.
2. Tujuan.

B. Pelaksanaan RAD-PG

1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja.
2. Gambaran Umum Strategi/Aksi/Indikator dan Pendanaan.
3. Pendokumentasian Praktik Baik.
4. Tantangan yang Dihadapi.
5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan.

C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan

1. Rekomendasi.
2. Rencana Tahun Depan.

D. Lampiran :

1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan.
2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PG.
3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B.
4. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode).

FORM PEMANTAUAN A:
 INDIKATOR KINERJA/KELUARAN RAD-PG TAHUN.....

Strategi	Aksi/Kegiatan	Indikator Kinerja	OPD Penanggungjawab	Capaian Output		Anggaran (Juta Rupiah)		Sumber Pendanaan	Kegiatan Stunting (Ya/tidak)
				Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TS1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman									
TS2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman									
TS3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)									
TS4: Penguatan Kelembagaan dan tata Kelola Pangan dan Gizi									

CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN A:

- Kolom 1 diisi dengan strategi rencana aksi pangan dan gizi
- Kolom 2 diisi dengan aksi penjabaran strategi untuk pencapaian tujuan RPJMD
- Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan aksi
- Kolom 4 diisi dengan OPD yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.
- Kolom 5 diisi dengan besar capaian output yang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan.
- Kolom 6 diisi dengan realisasi output sesuai dengan tahun pelaporan.
- Kolom 7 diisi dengan besar anggaran definitif yang dialokasikan untuk aksi.
- Kolom 8 diisi dengan besar anggaran yang diserap untuk aksi.
- Kolom 9 diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk aksi
- Kolom 10 diisi dengan YA jika kegiatan konvergensi penurunan stunting, dan TIDAK jika bukan kegiatan penurunan stunting

FORM PEMANTAUAN B: PROSES PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN.....			
Indikator Proses	Skor *Tahun Penilaian	Tantangan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
1. Melibatkan Pemangku Kepentingan untuk Beraksi Bersama			
2. memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Koheren			
3. Memastikan kegiatan terlaksana untuk mencapai hasil yang telah disetujui bersama			
4. Memantau Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya			
5. Indikator tambahan khusus tentang pemanfaatan RAD-PG dalam pelaksanaan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting			
Skor Mengikuti Skala Penilaian sbb:			
0	Belum dilakukan	Tidak dilakukan saat ini	
1	dilakukan	Prosesnya kurang berjalan dengan baik	
2	dilakukan	Prosesnya berjalan cukup baik	
3	dilakukan	Prosesnya berjalan sangat baik	
Catatan: Penjelasan mengenai indikator proses di atas dapat dilihat pada narasi pada sub bab 4.1.2. Pemberian skor tertinggi 3 (nilai 3). Forum Teknis RAD-PG harus mampu melampirkan bukti pada masing-masing penanda kemajuan sebagaimana tercantum pada pembahasan BAB V Pemantauan dan Evaluasi			
CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI B:			
a. Kolom 1 diisi dengan indikator proses yang akan dievaluasi			
b. Kolom 2 diisi dengan skor penanda kemajuan tahun berjalan yang dinilai. Pemberian nilai sesuai dengan skala penilaian angka 0 (terendah) hingga 3 (tertinggi).			
c. Kolom 3 diisi dengan deskripsi masalah atau tantangan yang ditemui pada masing-masing penanda kemajuan.			
d. Kolom 4 diisi dengan rencana tindak lanjut yang diharapkan untuk menghadapi tantangan dan pencapaian skor proses yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya			

FORM PEMANTAUAN D:
 FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN RAD-PG TAHUN...

NO	OPD	Kegiatan	Jumlah Alokasi Anggaran	Hasil	Tantangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN I

- a. Kolom 1 diisi dengan nomor yang berurut untuk mendeskripsikan banyaknya OPD
- b. Kolom 2 diisi dengan OPD yang telah melaksanakan kegiatan seperti yang tercantum dalam RAD-PG.
- c. Kolom 3 diisi dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-PG.
- d. Kolom 4 diisi dengan akumulasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- e. Kolom 5 diisi dengan : TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 terlaksana), dan TIDAK TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 tidak terlaksana).
- f. Kolom 6 diisi dengan tantangan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- Kolom 7 diisi dengan informasi tambahan yang perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 2, 3, 4, dan 6

FORM PEMANTAUAN C:
 UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN...

Strategi	Hasil Analisis	Rekomendasi
1	2	3
TS1: Peningkatan Ketersediaan Pangan, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman		
TS2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman		
TS3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)		
TS4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi		

CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN C:

- a. Kolom 1 diisi dengan tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi
- b. Kolom 2 diisi dengan hasil analisa terhadap Form Pemantauan dan Evaluasi A dan B.
- c. Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke OPD mana rekomendasi (kolom 3) akan ditujukan.
- d. Kolom 3 adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2.

BAB VI

PENUTUP

1. RAD-PG disusun oleh perangkat daerah yang terkait, secara bersama-sama dan dikoordinasikan oleh Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bagian Sumberdaya Alam sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. RAD-PG merupakan operasionalisasi strategi ketahanan pangan dan gizi yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dan TPB/SDGs.
3. RAD-PG menjadi instrumen penting karena mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan stunting.
4. RAD-PG penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:
 - a. Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA
 - b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA
 - c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial); dan
 - d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi
5. Pemantauan RAD-PG dilakukan melalui beberapa metode sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAD-PG dilakukan pada paruh waktu/mid-term dan akhir periode.
6. Pemanfaatan RAD-PG tidak hanya di kalangan pemerintah Kabupaten tetapi juga penting bagi mitra non pemerintah serta berbagai *stakeholder* lainnya.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH